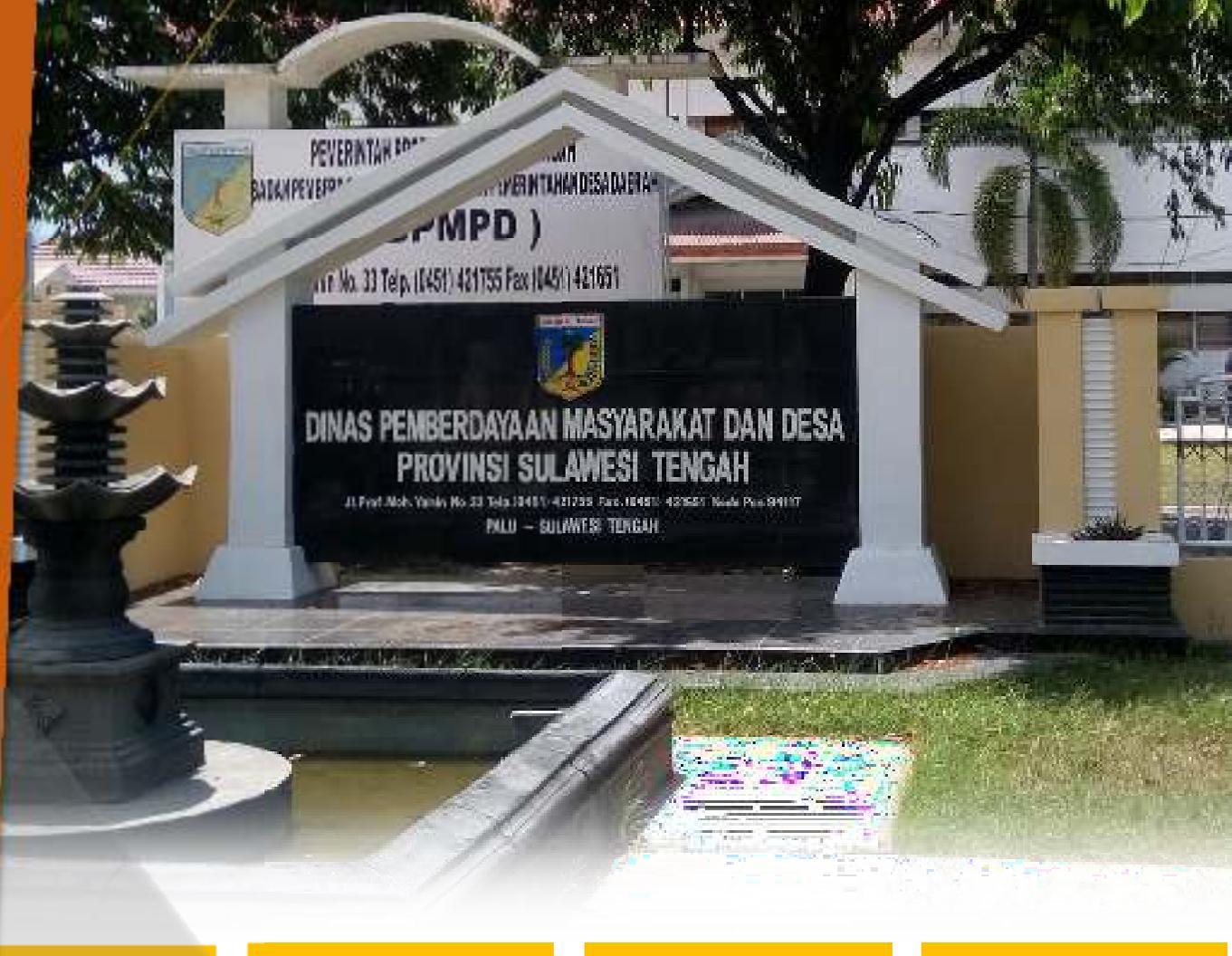


RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33, Telp : (0451) 421651-421830
Palu – Sulawesi Tengah
Kode Pos 94117



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 412755, Fax. (0451) 421651-421830

P A L U

Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 000.8.2.6/17/Dis.PMD

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk rasionalisasi target sasaran dan program pada Rencana Kerja, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perubahan yang disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Rencana Kerja maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|----------|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| BAB III | : | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2023;
 - b. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada periode tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal: 5 Mei 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2021.....	32
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	41
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.....	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	67
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	71
3.3 Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	95
4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	95
BAB V PENUTUP.....	111
5.1 Kaidah Pelaksanaan	111
5.2 Penutup.....	113

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2023 dan RKPD 2023 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas dukungan dan partisipasinya sehingga penyusunan Rencana Kerja ini dapat terwujud. Semoga Rencana Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan panduan kerja bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Palu, 5 Mei 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut dari dokumen perencanaan makro di daerah yang telah disusun yakni berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Bahwa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD, yang didalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja perubahan dibuat untuk mengarahkan target program dan kegiatan serta sub kegiatan yang lebih maksimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan pada tahun 2022, berupa antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 serta RKPD. Didasari hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, sedangkan Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital;

9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana strategis Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 156; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk perbaikan atas Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 000.8.2.6/17/Dis.PMD dalam merumuskan target Sasaran dan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2023 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Memuat perbaikan target sasaran, program dan kegiatan yang dirasionalisasi sehingga lebih memaksimalkan pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Merupakan pedoman dalam mencapai sasaran, keluaran dan hasil terhadap kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022
- 2.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 telah merumuskan 5 (lima) tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mempercepat pencapaian perkembangan desa menuju desa cepat berkembang, melalui penataan, evaluasi perkembangan, pengelolaan dan pendayagunaan basis data desa.
3. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui optimalisasi tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa
4. Meningkatkan penguatan dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan gotong royong masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Mewujudkan pemberdayaan desa melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan sasaran dan indikator kinerja utama serta target kinerja yang akan menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan perangkat daerah dalam pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam rencana strategis sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur yang profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya aparatur yang memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berkualitas dan berdaya saing	60% (4,88%)	80% (4,88%)	100% (4,88%)	5,42 %	10,85 %
2.	Mempercepat pencapaian perkembangan desa menuju desa cepat berkembang, melalui penataan, evaluasi perkembangan, pengelolaan dan pendayagunaan basis data desa	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa berkembang, Maju, Mandiri, dan sejahtera	Persentase pencapaian desa cepat berkembang 1. Desa Mandiri 2. Desa Maju 3. Desa Berkembang 4. Desa Tertinggal 5. Desa Sangat Tertinggal	60% 0,11 % 9,12 % 54,56 % 33,39 % 2,82 %	80% 0,65 % 14,50 % 59,50 % 23,67 % 1,68 %	100% 1,03 % 18,78 % 59,50 % 19,27 % 1,41 %	 2,28 % 28,34 % 54,02 % 14,44 % 0,92 %	 3,36 % 37,18 % 49,67 % 9,66 % 0,10 %
3.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui optimalisasi tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif, berkualitas dan akuntabel	Persentase Pencapaian Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan kerjasama antar desa	60% 7,76%	80% 7,76%	100% 4,94%	5,42 %	10,86%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
4.	Meningkatkan penguatan dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan gotong royong masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Pencapaian Penguatan KelembagaanDesa	60% 1,44%	80% 1,53%	100% 0,72	1,45%	1,93%
5.	Mewujudkan pemberdayaandesa melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat	Terwujudnya desa mandiri baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta potensi desa yang berdaya Saing	Persentase Pencapaian Kemandirian Masyarakat 1. Desa Mandiri	63,3% (2,82 %)	82,2% (1,68 %)	100% (1,41 %)	- (2,28%)	0,10 %

Adapun untuk kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 Program dan 38 Kegiatan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

A. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 berdasarkan DDPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: DPPA/B.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2020 adalah sebesar **Rp.23.310.357.611** terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 7.574.458.598
- b) Belanja Langsung Rp. 15.735.899.013

Rincian belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.968.031.080	9.702.482.018	81
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.861.950	361.190.650	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.925	49.993.925	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.142.525	89.773.525	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.719.500	230.225.500	98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.582.888.523	7.984.346.550	93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.574.458.598	7.000.914.634	92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	960.000.000	935.004.991	97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.429.925	48.426.925	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	54.959.825	50.466.825	92
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	54.959.825	50.466.825	92
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.454.950	185.183.750	99

	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.710.000	73.708.800	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	64.655.000	64.355.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.599.950	17.429.950	99
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.490.000	29.690.000	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	538.241.225	526.250.060	98
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.152.000	32.0120.050	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	93.547.500	93.547.410	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.303.000	30.300.408	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	50.000.000	50.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.194.725	44.194.725	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.044.000	276.087.467	96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.009.950	84.402.750	99
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	84.009.950	83.402.750	99
	Pengadaan aset tetap lainnya	1.000.000	1.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.980.359	166.829.133	88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	3.000.000	99

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.960.539	163.829.133	88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.119.200	343.812.300	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	164.219.200	163.219.200	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.900.000	179.900.000	100
2	Program Penataan Desa	1.668.569.334	1.662.518.748	100
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1.668.569.334	1.662.518.748	100
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	93.749.575	93.749.575	97
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	99.999.775	99.393.775	99
	Fasilitasi Kabupaten/Kotadan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	100.000.000	97.042.200	97
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1.374.819.984	1.372.333.198	100
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	454.462.700	436.765.036	96
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	454.462.700	436.765.036	96
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	92.309.925	87.872.925	95
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	64.250.175	63.950.175	100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	297.902.600	284.941.936	96

4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.555.793.210	2.471.728.245	97
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.555.793.210	2.471.728.245	97
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	289.184.650	283.250.450	98
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	44.499.900	44.499.900	100
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	51.499.750	48.556.250	94
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.507.050	64.616.658	99
	Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	50.000.075	49.600.075	99
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	894.630.525	880.646.387	98
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	226.945.000	209.174.856	92
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	99.999.775	97.103.775	97
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	577.516.310	551.436.406	95
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	117.079.475	102.264.633	87
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	50.874.725	50.874.725	100
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di	43.055.975	41.004.355	95

	Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	49.999.775	49.699.775	90
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8.271.016.430	8.109.562.886	98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.271.016.430	8.109.562.886	98
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	50.000.150	49.850.150	100
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	126.723.025	122.334.891	97
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239.657.300	238.255.660	99

	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.264.262.880	5.156.856.326	98
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	227.118.750	218.292.360	96
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	199.859.500	195.754.240	98
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	98.754.178	99
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.050	94.197.900	94
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.963.394.775	1.935.267.181	99
	TOTAL ANGGARAN	23.310.357.611	22.388.990.528	96

B. Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 diwujudkan dengan pencapaian Tujuan Strategis dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun dan pencapaian Sasaran Strategis dengan indikator kinerja Meningkatnya Status Perkembangan desa, dengan rincian capaian yakni:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	0,6650	0,6706	101
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	1,57	2,28	145
			Presentase Desa Maju	22,58	28,34	126
			Presentase Desa Berkembang	58,42	54,02	108
			Presentase Desa Tertinggal	16,29	14,44	113
			Presentase Desa Sangat Tertinggal	1,14	0,92	124

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(tahun berjalan)*
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
			2023	2020	Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi % (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2021	2021	2021	2022	2022	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	69,94	60	60	60	62	60		

2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	75	2 dokumen, 6 Laporan	71	11 Dokumen	71	73	71		
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	2 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	7 dokumen	19 dokumen	380%
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	15 Laporan	500%
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	5 laporan	250%
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran	97	92,62	97	89	92%	97	89	270,62	279%
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	72 org/bulan	70 orang/bulan	70 orang/bulan	100%	72 orang/bulan	70 orang/bulan	212 orang	294%
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	233%

2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/Stakeholder)	80	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	78	80,77	3 Laporan	300%
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 org, 3 kali	2 kali	12 orang, 3 kali	12 orang, 3 kali	100%	12 orang, 3 kali	12 orang, 3 kali	24 orang, 6 kali	200%
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 org, 2 Kali	2 kali, 6 orang	6 orang, 2 kali	6 orang, 2 kali	100%	6 orang, 2 kali	6 orang, 2 kali	18 orang, 6 kali	300%

2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 Laporan	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	1 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	5 paket	250%
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	12 paket	300%
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4 kali	4 kali	4 kali	100%	1 Laporan	4 kali	12 kali	400%
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	500%

2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	16 unit	800%
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	-	40 Set	40 Set	100,00%	40 Set	40 Set	80 set	400%
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	4 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	8 paket	400%
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	-	1 paket	100%
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	300%
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	36 bulan	300%
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	10 unit	13 unit	13 unit	100%	13 unit	13 unit	36 unit	200%
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	2 unit	8 unit	400%

2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	1 unit	2 unit	200%	2 unit	2 unit	5 unit	500%
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 Paket	1 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	4 paket	200%
2.13.02	Program Penataan Desa	presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	3,257	150,85	3,257	7,546	232%	100	3,257	7700,107	236417 %
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	-	12 Kab	12 Kab, 1 dokumen	100%	12 Kab, 1 dokumen	12 Kab, 1 dokumen	2 Dokumen	100%
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	-	32 Desa, 12 Kab	32 Desa (12 Kab), (1 dokumen)	100%	8 Desa, 4 Kab	32 Desa (12 Kab), (1 dokumen)	64 Desa, 2 dokumen	100%
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	89 Desa (89 Orang)	89 Desa	59 Desa	66%	59 Desa	89 Desa, 2 dokumen	237 Desa, 2 dokumen	100%

2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	20 Unit	7 Desa, 7 unit	6 unit	8 Unit	133%	8 Desa, 4 Kab, 6 unit	6 Desa, 6 unit	13 Desa, 21 unit	95%
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa dan Kawasan Perdesaaan	0,651	66,67	1,086	1,249	1,15	100,00	1,629	2944,67	452330 %
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Kali (12 Kab/11 Desa)	17 Desa	17 Desa (1 dok)	100,00%	10 Desa (1 kali/3 kab)	17 Desa (1 dok)	45 Desa, 2 Dokumen	50%
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0%
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaaan	5 Dokumen	1 kali, 2 Kabupaten	6 Kab	6 Kab (1 dok)	100%	2 kali, 6 Kab	6 Kab (1 dok)	1 kali, 12 Kab (2 dok)	40%
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien	10,858	88,89	5,429	10,15	0,19%	100,00	5,429	5528,04	6350%

2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Desa (2 Kab)	49 Desa	49 Desa (2 dok)	5 Desa (5 Kabupaten)	49 Desa (2 dok)	49 Desa (2 dok)	102 Desa, 4 dokumen	100%
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	5 dokumen	-	4 Kab	-	-	-	-	-	0%
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dlm penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	4 Dokumen	-	5 Desa (5 Kab)	5 Desa (5 Kab), (1 dok)	5 Desa (5 Kab)	5 Desa (5 Kab), (1 dok)	5 Desa (5 Kab), (1 dok)	10 Desa (5 Kab) (2 dok)	50%
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	36 Orang (36 Desa)	4 Kab	4 Kab	45 Desa	4 Kab	4 Kab	36 Desa, 8 Kab	300%
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	12 Desa di 12 Kab	12 Desa /7Kel di 13 Kab/Kota	12 Desa/7 Kel di 13 Kab/Kota (2 dok)	12 Desa /12 Kel di 13 Kab/Kota	12 Desa/7 Kel di 13 Kab/Kota (2 dok)	12 Desa/7 Kel di 13 Kab/Kota (2 dok)	36 Desa, 4dokumen	133%	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	35 Desa (35 Orang)	5 Kab	5 Kab, 1 dokumen	12 Desa / 12 Kel	5 Kab, 1 dokumen	5 Kab, 1 dokumen	35 Desa (10 Kab) (2 Dok)	67%	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100 Orang	60 Orang	112 org	112 org	90 org	112 org	112 org	284 org	284%	
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	-	92 Bumdesa	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1,861	71,44%	1,448	2,32	100,00%	2,322354928	2,322354928	151,81	8%	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%	

2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	120 Lembaga	13 Lembaga Adat, 35 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	115 LKD	115 LKD	13 Lembaga Adat, 30 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	115 LKD	115 LKD	13 Lembaga Adat, 35 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	11%
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40 Unit	-	30 Unit	30 unit	2 Kegiatan 9 Kabupaten/Kota (30 unit)	30 unit	30 unit	60 Unit	150%

2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	80 Orang Pelaku UMKM dan Pengurus Unit Usaha BUMDesa	75 Pengurus Unit Usaha BUMDes, UMK (1 dok)	50 Pengurus Bumdes, UMK	92 Bumdes, UMK	50 Pengurus Bumdes, UMK	92 Bumdes, UMK	92 Bumdes, UMK	259 BUMDesa, 1 dokumen	324%
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	4 Posyantek	6 Posyantek	6 Posyantek , 1 dokumen	12 Posyantek	6 Posyantek, 1 dokumen	6 Posyantek, 1 dokumen	16 posyantek, 2 dokumen	100%
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Laporan	2 keg (196 Orang),(2 dok)	11 Kab, 142 TP-PKK	11 Kab, 142 TP-PKK, 2 dokumen	2 Kegiatan	11 Kab, 142 TP-PKK, 2 dokumen	11 Kab, 142 TP-PKK, 2 dokumen	2 Kegiatan, 4 dokumen	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Menindaklanjuti hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, maka Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

- f. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
- g. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (*satu*) Sekretariat dengan 3 (*tiga*) Sub Bagian serta 4 (*empat*) Bidang dengan 12 (*dua belas*) Sub Bidang dan 1 (*satu*) kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa
4. Bidang Pemerintahan Desa
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa
6. Bidang Pemberdayaan Desa

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan dan Asset, Kepegawaian, Umum dan Korpri di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat terdapat tiga bagian yaitu:

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 3. Fungsional Perencana
2. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di bidang Pembinaan Administrasi Penataan Desa, Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan operasional penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
 - b. Mendistribusikan tugas penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
 - c. Memberi petunjuk penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
 - d. Menyelia (mengawasi untuk pembinaan) penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
 - e. Menyelenggarakan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;

- f. Mengevaluasi penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- g. Membuat laporan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Penataan dan Perkembangan Desa terdapat tiga seksi yaitu :

- 1. Seksi Penataan Desa;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data Desa.
3. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang Administrasi dan Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan operasional penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
 - b. Mendistribusikan tugas penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
 - c. Memberi petunjuk penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
 - d. Menyelia penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
 - e. Menyelenggarakan penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;

- f. Mengevaluasi penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
 - g. Membuat laporan penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan operasional pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;
 - b. Mendistribusikan tugas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;
 - c. Memberi petunjuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;
 - d. Menyelia pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;
 - f. Mengevaluasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat;

- g. Membuat laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pembinaan ketahanan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasional pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan ttg dan sda;
- b. Mendistribusikan tugas pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan ttg dan sda;
- c. Memberi petunjuk pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan ttg dan sda;
- d. Menyelia pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan ttg dan sda;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan ttg dan sda;
- f. Mengevaluasi pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan TTTG dan SDA;

- g. Membuat laporan pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan TTG dan SDA; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional, sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, dimana ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional, (namun belum terisi Pejabatnya).

Terdiri dari 4 (empat) Jabatan Fungsional:

1. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ;
2. Arsiparis;
3. Supervisor Komputer;
4. Bendaharawan;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2022 dan Prakiraan 2023-2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun					Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Desa Membangun		√	0,6650	0,6820	0,6990	0,7160	0,7330	0,6480	0,6650	0,6820	0,6990	
2	Persentase Desa Mandiri		√	1,57	3,366	4,452	5,537	6.623	1,031	2,280	3,366	4,452	
3	Persentase Desa Maju		√	22,58	37,188	44,463	51,520	60,912	18,784	28,339	37,188	44,463	
4	Persentase Desa Berkembang		√	58,41	49,674	46,308	42,942	32,465	59,501	54,017	49,674	46,308	
5	Persentase Desa Tertinggal		√	16,29	9,663	4,777	-	-	19,273	14,441	9,663	4,777	
6	Persentase Desa Sangat Tertinggal		√	1,14	0.109	-	-	-	1,412	0,923	0.109	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersediaan SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

- Kendala dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

- Tantangan dan Peluang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi.

Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi. Adapun kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004
- b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 2004 Nomor: 410/2917/SJ perihal Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 2005 Nomor: 410/1320/SJ perihal Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
- f. Tersedianya kuantitas SDM.
- g. Tersedianya Dana pada APBD.
- h. Tersedianya Sarana yang memadai.

2. Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan factor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tupoksi yang masih tumpang tindih baik secara internal (antar bidang) maupun External (antar SKPD);
- b. Database dan System Information Management masih lemah.
- c. Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan.
- d. Kinerja aparat yang belum optimal.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
- f. Tenaga fungsional belum terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas.

Analisis lingkungan eksternal:

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

Peluang

- a. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.
- b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- c. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat.
- d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta dukungan partisipasi masyarakat.
- e. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

Tantangan

- a. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup besar;
- b. Luasnya wilayah perdesaan dan jumlah desa sasaran yang cukup banyak dalam pelaksanaan program kegiatan;
- c. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap hakekat Pemberdayaan;
- d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok-kelompok masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di perdesaan;
- e. Prasarana dan sarana perdesaan yang kurang memadai;
- f. Belum optimalnya Pelayanan publik pemerintahan Desa.
- g. Keterpencilan lokasi desa, baik di kepulauan maupun di pegunungan.

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

- a. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal serta meningkatkan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri.
- b. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
- d. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- e. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
- f. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- g. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
- h. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2023 yang diusulkan tidak semua sub kegiatan dimasukkan dalam usulan Rencana kerja, selain itu masih terdapat target kinerja dan pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang belum sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah, selengkapnya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Perangkat Daerah : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**
Periode / Tahun : **2023**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	11,366,870,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	12,256,899,446	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	SAKIP	75	365,193,554	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	SAKIP	75	350,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	85,193,554	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	150,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	100,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	200,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97%	9,519,165,783	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97%	9,666,899,446	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	8,602,365,782.91	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	8,505,159,446	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	854,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,091,740,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	62,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	70,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	80,663,151	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	75,000,000	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	80,663,151			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	80,663,151	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	75,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	88.50	313,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	88.50	200,000,000	
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	50,000,000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	100,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	50,000,000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	54,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	50,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang, 3 kali	45,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang, 3 kali	50,000,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang, 2 kali	64,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang, 2 kali	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	425,400,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	710,000,000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	425,400,000			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	22,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	77,400,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	80,000,000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	32,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30,000,000	

	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	40,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	50,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	54,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	710,000,000	
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	150,000,000			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	300,000,000	
	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Set	30,000,000	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Set	200,000,000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	50,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	200,000,000	

	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	173,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	173,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	170,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	170,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	340,447,512	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	372,000,000	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	340,447,512			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	160,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	200,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	52,000,000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	110,447,512	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 paket	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 paket	20,000,000	
	Program Penataan Desa	12 Kab	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar	3.257	1,343,650,000	Program Penataan Desa	12 Kab	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar	3.257	1,209,820,000	
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan	1,343,650,000	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan	1,209,820,000	
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	140,000,000	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	-	
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	240,000,000	
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	241,000,000	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	20 unit	803,650,000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	20 unit	728,820,000	

	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	0.380	171,820,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	0.380	355,000,000	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Laporan	171,820,000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Laporan	355,000,000	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	44,000,000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	3 Dokumen	44,000,000	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	3 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	83,820,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	155,000,000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	10.858	652,920,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	10.858	1,960,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan	652,920,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan		

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 Dokumen	12,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 Dokumen	20,000,000	
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen	40,000,000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	5 Dokumen	12,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	5 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	12,000,000	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	20,000,000	

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	600,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	52,920,000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	320,000,000	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100 org	50,000,000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100 org	100,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 org	40,000,000	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 org	50,000,000	
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	20,000,000	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	50,000,000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	12,000,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	50,000,000	

	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	12,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	50,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	40,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	24,000,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	12,000,000	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	50,000,000	

	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	12,000,000	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	50,000,000	
	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12,000,000	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1.810	2,868,400,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1.810	4,129,920,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	1 Laporan	2,868,400,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	1 Laporan	4,129,920,000	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	150,000,000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	200,000,000	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen	200,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	120 Lembaga	200,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	120 Lembaga	220,000,000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	43 unit	438,400,000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	43 unit	540,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	500,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	250,000,000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	200,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	250,000,000	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	240,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan	930,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan	1,489,920,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	120,000,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	120,000,000	
	JUMLAH				16,403,660,000	JUMLAH				19,911,639,446	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, maka melalui Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan upaya konkrit untuk menjawab isu-isu strategis tersebut yaitu dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari pemangku jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Perangkat

Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode / Tahun : 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENATAAN DESA		Presentase Kelembagaan Desa yang ditata Sesuai Standar		
	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp 2,528,814,328	
		- Desa Baya, Kab. Banggai			
		- Desa Mekar sari, Kab. Banggai			
		- Desa Biak Kec. Luwuk Utara Kabupaten Banggai			
		- Desa Porame Kab Sigi, Kab. Sigi			
		- Desa Guntarano Kab Donggala			
		- Desa Jono Kab Sigi			
		- Desa Bale Kab Sigi			

- Desa Puro''o Kab Sigi			
- Desa Barati Kec. Pamona Tenggara kab. Poso			
- Desa Toraranga Kec. Siniu Kab. Parimo			
- Desa Lembah Bomban Kec. Bolano , Kab. Parigi Moutong			
- Desa Karya Agung Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong			
- Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parimo			
- Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parimo			
- Desa dusunan barat Kec. Tinombo Kab. Parimo			
- Desa Tada Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo			
- Desa Petak, Kab. Banggai			
- Desa Kayu Agung, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Korompeeli, Kab. Morowali Utara			
- Desa Tomata, Kab. Morowali Utara			
- Desa Maliwuko, Kab. Poso			
- Desa Tinompo, Kab. Morowali Utara			
- Desa AWu, Kab. Banggai			
- Desa pusungi, Kab. Tojo Una Una			
- Desa patingko, Kab. Tojo Una Una			
- Desa uemakuni, Kab. Tojo Una Una			
- Desa Tumpapa Indah Kec Balinggi Kab Parimo			
- Desa Tibu Kec. Tinombo Kab Parimo			
- Desa Kasimbar Kec Kasimbar Kab Parimo			
- Desa Petunagusi Kec Bolano Lambunu Kab Parimo			
- Desa Wanamukti Barat Kec Bolano Kab Parimo			
- Desa Bahomoahi Kec. Bungku Timur Kab. Morowali			
- Desa Wanagading Kec Bolana Lambunu Kab Parimo			
- Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan Kab. Parimo			
- Desa Silanga Kec. Sidiu Kab. Parimo			

		- Desa Sritabaang Kec Bolano Kab Parimo			
		- Desa Toraranga Kec Siniu Kab Parimo			
		- Desa Kayu Agung Kec Mepanga Kab Parimo			
		- Desa ogotumubu barat, kec. Tomini kab. Parigi moutong			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien		
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan BUMDesa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 879,257,187	
		- Desa Pandayora Kec Pamona Selatan Kab Poso			
		- Kabupaten Donggala			
		- Kabupaten Poso			
		- Kabupaten Tojo Una-Una			
		- Desa Beringin Jaya Kec Bolano Kab Parimo			
		- Desa Leboni Kec Pamona Pusalemba Kab Poso			
		- Desa Tamandue Kec Lore Timur Kab Poso			
		- Desa Sampeantaba Kec. Witaponda, Kab.Morowali.			
		- Desa Samarendu Kec. Bumi Raya, Kab.Morowali.			
		- Desa Buleleng Kec.Bungku Pesisir, Kab.Morowali.			
		- Desa Puntari Makmur Kec. Witaponda Kab. Morowali			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten		
Sub Kegiatan :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Desa Langaleso Kec. Dolo Kab Sigi - Kelurahan Taipa Kota Palu - Desa Sarombaya Kab Donggala - Desa Sejahtera Kab Sigi - Kelurahan Baru, Kab. Toli Toli - Kelurahan Pengawu Kec Tatanga - Kelurahan Buluri Kec Ulujadi - Kelurahan Talise Kota Palu - Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu - Kelurahan lolu Utara Kota Palu - Kelurahan Tipo Kota Palu	Rp 3,587,500,000		

- Kelurahan Watusampu			
- Kelurahan Palupi			
- Kelurahan Balaroa			
- Kelurahan Lere			
- Kelurahan Ujuna			
- Desa Donggulu, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Maninili, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Gio Timur, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Sidomukti, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Bukit Makmur, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Kotanagaya, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Petunasugi, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Wanamukti Barat, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Taopa, Kab. Parigi Moutong			
- Desa Kotanagaya Kab. Parigi Moutong			
- Desa Sumber Agung Kab. Parigi Moutong			
- Desa Tinombala Barat Kab. Parigi Moutong			
- Desa mamulusan Kab. Banggai Kepulauan			
- Desa Toiba Kab. Banggai			
- Desa Bone bae, Kab. Banggai			
- Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu			
- Kelurahan Birobuli Selatan			
- Kelurahan Palupi, Kota Palu			
- Kelurahan Duyu, Kota Palu			
- Kelurahan Lere, Kota Palu			
- Desa Tomini Kec Tomini Kab Parimo			
- Kelurahan Talise Kota Palu			
- Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur			
- Kec Bolano Kab Parigi Moutong			
- Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah			

	- Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu			
	- Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu			
	- Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol			
	- Desa Sibaluton Kec Basidondo Kab. Tolitoli			
	- Kel. Pantoloan Boya Kec Tawaeli			
	- Kelurahan Kilongan Permai Kec Luwuk Utara			
	- Desa Tindaki, Kab. Parigi Moutong			
	- Desa Binangga, Kec Parigi Tengah, Kab Parigi Moutong			
	- Desa Lanumor Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara			
	- Kelurahan Salakan Kec Tinangkung Kab Banggai Kepulauan			
	- Kelurahan Nunu Kec Tatanga			
	- Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu			
	- Desa Cendana Putra Kec. Toili Kabupaten Banggai			
	- Desa Dwipakarya Kec. Simpang Raya			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah, selanjutnya kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termuat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 point g pada urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan Pemerintah dalam berbagai cara diantaranya dengan menempatkan desa sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini didasari pemahaman bahwa desa memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana desa memiliki peran sebagai pendorong tumbuhnya potensi-potensi lokal desa di berbagai bidang yang ada. Selanjutnya untuk memposisikan desa sebagai motor penggerak utama pembangunan di desa maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peran yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa. Desa yang pada beberapa

dekade hanya menjadi obyek pembangunan, maka dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut menjadikan desa memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang mampu mendorong Bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan aturan pemberian insentif/penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya.

Melalui Undang-undang Desa terbuka ruang yang luas bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka sehingga berkembang lebih pesat secara bersama.

Sejak beberapa dekade Pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada

Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Dalam menjaga sinergitas pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah. Adapun kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
2. Berkembangnya status Pembangunan Desa.
3. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagai Lembaga Teknis yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dirumuskan arah kebijakan guna pencapaian tujuan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penguatan penataan kelembagaan desa guna penataan desa sesuai standar.
2. Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Fasilitasi penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan yang didukung oleh Lembaga Ekonomi Masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Fasilitasi penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai aktor perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian adat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”** dengan indikator Tujuan **“Indeks Desa Membangun”**. Sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai adalah **Berkembangnya status Pembangunan Desa**.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kinerja Tujuan dan Sasaran Thn 2023
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6820
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	%	3,366
			Presentase Desa Maju	%	37,188
			Presentase Desa Berkembang	%	49,674
			Presentase Desa Tertinggal	%	9,663
			Presentase Desa Sangat Tertinggal	%	0.109

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Visi Misi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2026, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, dan merumuskan 9 Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Berdasarkan RPJMD dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan arahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mendukung misi sebagai berikut:

➤ **Misi ke- 2** Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM menfokuskan pada tujuan:

– Tujuan 2.1; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) dengan sasaran:

1) Sasaran 2.1.1.

Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisiensi dan transparan) melalui strategi:

- Strategi 2.1.1.1

Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah.

- Strategi 2.1.1.2

Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur.

- Strategi 2.1.1.3

Menerapkan pola karir ASN.

- Strategi 2.1.1.4

Memberikan reward and punishment terhadap ASN.

Arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan

kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Reformasi Birokrasi Tematik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengamanatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah pengampuh penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan selanjutnya dilaksanakan melalui bimbingan teknis kewirausahaan bagi masyarakat miskin berdasarkan data P3KE.

- **Misi ke- 3** Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan dengan menfokuskan pada tujuan:
 - Tujuan 3.2
Menurunkan kemiskinan, dengan sasaran:
 - 1). Sasaran 3.2.2

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa melalui strategi:

- Strategi 3.2.2.1

Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Sebagai Perangkat Daerah pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pelaksanaan kinerja yang dituangkan dalam program/kegiatan pada tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut;

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun ditargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan selanjutnya pada tahun 2025 ditargetkan tidak terdapat desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Implementasi strategi-strategi tersebut diatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonominya, akan tetapi permasalahan yang sering timbul adalah pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga ekonomi desa serta masyarakat miskin itu sendiri belum mampu untuk menjaga keberlangsungan hasil yang diperoleh masyarakat miskin dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Selain itu selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat belum dapat tercapai secara optimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kewenangan, alokasi anggaran yang minim, koordinasi dan sinergitas program belum berjalan dengan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pemanfaatan data penduduk miskin (by name & by address) belum dilakukan.

- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Penataan Administrasi

Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah 5 Program, 8

Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 40 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;

4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa;
- Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa.
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.

- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa.
- Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa.
- Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun penyebaran lokasi dan analisis kebutuhan dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2023
Prakiraan Maju : 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				16,403,660,000	DAU			19,253,070,000
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	64	11,366,870,000	DAU		66	13,740,140,000
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	Provinsi dan 12 Kab	75	365,193,554	DAU		80	402,304,370
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	5 dokumen	85,193,554	DAU		5 dokumen	140,204,370

2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	3 laporan	80,000,000	DAU		3 laporan	82,100,000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	2 Laporan	200,000,000	DAU		2 Laporan	180,000,000
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran	Provinsi	97	9,519,165,783	DAU		97	10,517,365,780
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	72 orang/bulan	8,602,365,782.91	DAU		72 orang/bulan	9,102,365,780
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	1 Dokumen	854,000,000	DAU		1 Dokumen	1,354,000,000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	3 Laporan	62,800,000	DAU		3 Laporan	61,000,000
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Provinsi dan Kab	1 Dokumen	80,663,151	DAU		1 Dokumen	150,000,000
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	80,663,151			1 Laporan	150,000,000
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi dan Kab	1 Laporan	80,663,151	DAU		1 Laporan	150,000,000

2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	Provinsi	88,50	313,000,000	DAU		90	560,300,000
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	1 paket	50,000,000	DAU		1 paket	160,300,000
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	1 Laporan	100,000,000	DAU		1 Laporan	100,000,000
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	1 Laporan	54,000,000	DAU		1 Laporan	200,000,000
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	12 orang, 3 kali	45,000,000	DAU		12 orang, 3 kali	60,000,000
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan 12 Kab	6 orang, 2 kali	64,000,000	DAU		6 orang, 2 kali	40,000,000
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Provinsi dan 12 Kab	1 Dokumen	425,400,000	DAU		1 Dokumen	676,000,000
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1 Laporan	425,400,000			1 Laporan	676,000,000
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 paket	22,000,000	DAU		1 paket	50,000,000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	2 paket	77,400,000	DAU		2 paket	250,000,000
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi	1 paket	32,000,000	DAU		1 paket	50,000,000

2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	4 paket	40,000,000	DAU		4 paket	50,000,000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	1 paket	54,000,000	DAU		1 paket	76,000,000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	3 Laporan	200,000,000	DAU		3 Laporan	200,000,000
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	1 Dokumen	150,000,000	DAU		1 Dokumen	505,000,000
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	150,000,000			1 Laporan	505,000,000
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi	2 Unit	60,000,000	DAU		2 Unit	400,000,000
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi	20 Set	30,000,000	DAU		20 Set	30,000,000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi	2 paket	50,000,000	DAU		2 paket	50,000,000
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Provinsi	1 paket	10,000,000			1 paket	25,000,000

2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Provinsi	1 Laporan	173,000,000	DAU		1 Laporan	187,000,000
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	4 Laporan	3,000,000	DAU		4 Laporan	5,000,000
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	12 bulan	170,000,000	DAU		12 bulan	182,000,000
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Provinsi	1 Dokumen	340,447,512	DAU		1 Dokumen	742,169,850
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	340,447,512			1 Laporan	742,169,850
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	18 unit	160,000,000	DAU		18 unit	180,000,000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi	2 unit	50,000,000	DAU		2 unit	100,000,000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	1 unit	110,447,512	DAU		1 unit	100,000,000
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	2 paket	20,000,000	DAU		2 paket	362,169,850

2.13.02	Program Penataan Desa	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar	12 Kab	3.257	1,343,650,000	DAU		3.800	1,470,670,000
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	1 Laporan	1,343,650,000			1 Laporan	1,470,670,000
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	12 Kab	2 Dokumen	140,000,000	DAU		2 Dokumen	110,000,000
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	2 Dokumen	200,000,000	DAU		2 Dokumen	220,000,000
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	12 Kab	2 Dokumen	200,000,000	DAU		2 Dokumen	220,000,000
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	20 unit	803,650,000	DAU		20 unit	920,670,000
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase peningkatan perkembangan Desa melalui kerjasama desa	12 Kab	0.380	171,820,000	DAU		0.543	188,060,000

2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terfasilitasniya Kerjasama Antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi	12 Kab	1 Laporan	Rp 171,820,000	DAU		1 Laporan	Rp 188,060,000
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	4 Dokumen	44,000,000	DAU		4 Dokumen	52,000,000
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	12 Kab	4 Dokumen	44,000,000	DAU		4 Dokumen	52,000,000
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	5 Dokumen	83,820,000	DAU		5 Dokumen	84,060,000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	12 Kab	10.858	652,920,000	DAU		11.944	714,650,000
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	1 Laporan	Rp 652,920,000	DAU		1 Laporan	Rp 714,650,000
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	12 Kab	5 Dokumen	12,000,000	DAU		5 Dokumen	20,000,000

2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	4 Dokumen	40,000,000	DAU		4 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	12 Kab	5 Dokumen	12,000,000	DAU		5 Dokumen	20,000,000
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	4 Dokumen	40,000,000	DAU		4 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	3 Dokumen	40,000,000	DAU		3 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	3 Dokumen	40,000,000	DAU		3 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	12 Kab	12,000,000	DAU		12 Kab	12,000,000
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	3 Dokumen	50,000,000	DAU		3 Dokumen	50,000,000

2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	3 Dokumen	52,920,000	DAU		3 Dokumen	53,203,988
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	12 Kab	100 org	50,000,000	DAU		100 org	51,446,012
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12 Kab	40 org	40,000,000	DAU		40 org	50,000,000
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	6 Dokumen	20,000,000	DAU		6 Dokumen	50,000,000
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Kab	6 Dokumen	12,000,000	DAU		6 Dokumen	14,000,000
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotadalam Pembiayaan Desa	12 Kab	6 Dokumen	12,000,000	DAU		6 Dokumen	14,000,000

2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Kab	2 Dokumen	40,000,000	DAU		2 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	2 Dokumen	40,000,000	DAU		2 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	6 Dokumen	24,000,000	DAU		6 Dokumen	24,000,000
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	4 Dokumen	40,000,000	DAU		4 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	6 Dokumen	40,000,000	DAU		6 Dokumen	40,000,000
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	12 Kab	24 Desa	12,000,000	DAU		24 Desa	12,000,000
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	1 Laporan	12,000,000	DAU		1 Laporan	12,000,000

2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	2 Dokumen	12,000,000	DAU		2 Dokumen	12,000,000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	12 Kab	1.810	2,868,400,000	DAU		1.930	3,139,550,000
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	12 Kab	1 Laporan	2,868,400,000	DAU		1 Laporan	3,139,550,000
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	2 Dokumen	150,000,000	DAU		2 Dokumen	150,000,000
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	13 Dokumen	200,000,000	DAU		13 Dokumen	200,000,000

2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	12 Kab	120 Lembaga	200,000,000	DAU		120 Lembaga	200,000,000
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	40 unit	Rp 438,400,000	DAU		40 unit	609,550,000
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	2 Dokumen	250,000,000	DAU		2 Dokumen	250,000,000
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	2 Dokumen	200,000,000	DAU		2 Dokumen	200,000,000
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	1 Laporan	200,000,000	DAU		1 Laporan	200,000,000

2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	3 Dokumen	200,000,000	DAU		3 Dokumen	200,000,000
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	5 Laporan	930,000,000	DAU		5 Laporan	1,030,000,000
2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Kab	50 Keluarga	50,000,000	DAU		50 Keluarga	50,000,000
2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	12 Kab	50 Keluarga	50,000,000	DAU		50 Keluarga	50,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 pada yaitu Misi ke-2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM dan Misi ke-3 Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 5 Program, 8 Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 40 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian program prioritas sebagai berikut:

- (1) Program Penataan Desa
- (2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- (2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- (4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2023				
						Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						23,644,359,446			
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi, Pelayanan dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi, Pelayanan yang efektif dan efisien serta Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	64	13,058,668,767	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab	
		2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	73	75	379,572,950	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab	

		2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	60,965,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 Laporan	122,575,400.00	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 Laporan	196,032,550	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran	96.05	97	9,875,439,334	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	65 orang/bulan	8,505,159,534	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1,290,280,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	79,999,800	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	85,999,900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab

				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	2 Laporan	85,999,900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab
		2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	80.77	88.50	204,085,125	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	5 Dokumen	55,000,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan	26,590,575	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	9 org,2 kali	52,334,700	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	11 org,3 Kali	70,159,850	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	686,534,451	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab

				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan			
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	25,009,050	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	73,124,650	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	24,499,626	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	50,000,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	25,000,225	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3 Laporan	488,900,900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,189,010,207	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan			

		2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 unit	287,150,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	20 set	112,690,536	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	2 paket	789,169,671	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 paket	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	243,507,600	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan	5,000,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	238,507,600	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	394,519,200	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan			

		2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	31 unit	159,719,200	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	44 Unit	194,800,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	40,000,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Meningkatnya status Perkembangan Desa			Indeks Desa Membangun	0.6480	0.6820		Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.02	Program Penataan Desa	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar	2.389	3.257	2,848,723,978	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan	1 Laporan	2,848,723,978	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 dokumen	2 Dokumen	40,650,000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 dokumen	3 Dokumen	50,000,200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	20 Unit	39 Unit	2,758,073,778	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase peningkatan kerjasama desa dan Kawasan Perdesaan	0,651	0.380	162,350,450	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terfasilitasnya Kerjasama Antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	162,350,450	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	62,350,300	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	4 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	5 dokumen	100,000,150	Dinas PMD Prov.	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	13.572	10.858	2,174,665,587	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	2,174,665,587	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	4 dokumen	5 Dokumen	232,000,300	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	5 dokumen	3 Dokumen	32,000,050	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4 dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	14 dokumen	452,000,000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 dokumen	5 dokumen	70,000,400	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100 org	56 Org	308,466,400	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 org	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	3 Dokumen	1,030,198,237	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	3 Dokumen	50,000,200	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2.776	1.810	5,399,950,664	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	5,399,950,664	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen	5 Dok	99,999,800	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	125 Lembaga	125 Lembaga	125,000,000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	43 Unit	56 Unit	3,531,390,789	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	166,100,253	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	1 Dokumen	90,830,200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,060	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan	9 Laporan	1,286,629,562	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab

BAB V

PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu upaya memberdayakan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan implementasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dimana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan Rencana Kerja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara sistematis dan konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawes Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja

5.2 PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaansumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungandan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 5 Mei 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661608 198603 1 009